

ABSTRAK

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan suatu perjanjian yang riil yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan yang nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Namun sering terjadi pula benda/barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai sendiri melainkan milik orang lain yang didapat dari sewa menyewa, peminjaman maupun curian sehingga dapat menimbulkan masalah hukum, apabila pemilik yang sebenarnya melakukan gugatan. Seperti yang terjadi di Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan, dimana nasabah menggadaikan barang hasil curian dan peminjaman dari pihak ketiga. Dengan demikian perlu ada perlindungan hukum terhadap mereka yang dirugikan baik kepada Perum Pegadaian selaku pemegang gadai dan maupun pihak ke III yang mempunyai barang yang telah digadaikan di Perum Pegadaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian gadai terhadap barang bukan milik debitor di Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam pelaksanaan perjanjian gadai terhadap barang bukan milik debitor di Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*, dalam arti mengkaji peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi

sebagai bahan penunjang. Khususnya menganalisa perjanjian gadai terhadap barang yang bukan milik pemberi gadai. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan perjanjian gadai terhadap barang gadai bukan milik debitur pada Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan bahwa barang jaminan tersebut bukan miliknya yang berasal dari pinjam meminjam atau barang yang berasal dari barang perjanjian gadai tetap sah karena Perum Pegadaian dengan itikad baik menganggap bahwa barang yang dibawa atau dikuasainya adalah dianggap sebagai pemiliknya. Kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan perjanjian gadai terhadap barang bukan milik debitur di Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan adalah jika terdapat permasalahan benda gadai dari hasil kejahatan pencurian atau penggelapan, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : gadai, barang bukan milik sendiri, perjanjian gadai

ABSTRACT

The mortgage is a SOE in Indonesia which is the core business services sector lending to the public on the basis of the law of pledge. Pawn is a real agreement is an agreement that in addition to terms required an act of real (in this case the handover of the goods pawn). But often there is also the object / goods pawned does not belong to the pledgor's own but belongs to another person obtained from a lease, loan or stolen so that it can give rise to legal issues, if the actual owner sued. As happened in Pawnshop Lamongan, where customers pawning items stolen and borrowing from third parties. Thus there should be legal protection against those who harmed both the Pawnshop as lien holder and as well as to third parties who have been mortgaged by the Pawnshop.

This study aimed to analyze the implementation of the pledge agreement on goods not belonging to the debtor at the Pawnshop Lamongan and analyze the constraints and solutions in the implementation of the pledge agreement on goods not belonging to the debtor at the Pawnshop Lamongan.

This study uses empirical juridical approach, in the sense of reviewing laws - laws relating to issues to be discussed, and also conducted a field approach to obtain information as supporting material. In particular analyzing pledge agreement on goods that do not belong to the pledgor. Specifications of this study was analytic

*descriptive describe laws - laws that apply to the theory - the theory of law and
positive law enforcement practice concerning these issues.*